

## **Pengaruh Sikap Fiskus, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung**

**Kristin Candra Sari, Kusnadi dan Muhammad Luthfi**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati

Jl. Pramuka No.27 Kemiling Bandar Lampung 35153

Email : [kristincandra94@gmail.com](mailto:kristincandra94@gmail.com); [kusnadi.msi@gmail.com](mailto:kusnadi.msi@gmail.com); [luthfi27@gmail.com](mailto:luthfi27@gmail.com)

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sikap fiskus, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan 94 sampel dari 100 koisioner yang disebarakan kepada wajib pajak badan yang membayar pajak di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung. Untuk sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan uji kualitas data, uji normalitas data, dan statistik deskripsi. Pada penelitian ini metode analisi data yang digunakan adalah uji regresi linear berganda dan uji t. Hasil yang didapatkan dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung. Sedangkan hasil pengujian hipotesis pada sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung.

**Kata kunci :** *Kepatuhan wajib pajak badan, sikap fiskus, sistem administrasi perpajakan modern, sanksi pajak.*

### **1. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut data dari KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar pajak lebih rendah dibanding dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Berikut data jumlah wajib pajak yang membayar pajak tahun 2011 s/d 2015 di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung.

**Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Badan Tahun 2011 s/d 2015 di KPP Pratama Teluk Betung**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar pajak</b>	<b>Persentase</b>
2011	374	156	41,71%
2012	286	107	37,41%
2013	278	114	41%

2014	197	96	48,73%
2015	221	64	28,95%

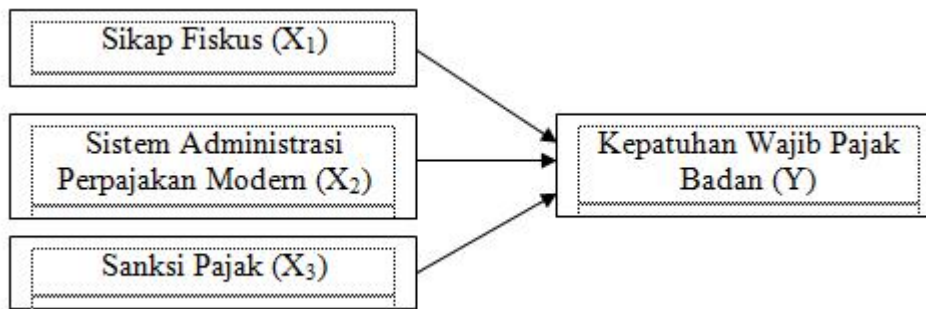
(Sumber :KPP Pratama Teluk Betung)

Data dari tahun 2011 sampai dengan 2015 jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak tahunan lebih rendah apabila dibandingkan dengan Wajib Pajak yang terdaftar, dan jika dilihat dari presentase tingkat kepatuhan wajib pajak menurun, dari fenomena ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sikap fiskus, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- Apakah sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

**Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi hanya dilakukan pada pengaruh sikap fiskus, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung.



**Gambar 1. 1 Kerangka Pikir**

**2. Kajian Pustaka**

**Definisi Pajak secara Umum**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (wikipedia, 2010).

**Normative beliefs**

*Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

**Sikap Fiskus**

Pelayanan adalah cara melayani (membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Dengan demikian, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak.

### **Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern menurut Sofyan (2012) adalah sebagai berikut : sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

## **3. Metode Penelitian**

### **Profil Objek Penelitian**

Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung pada awalnya merupakan Kantor Dinas Luar Pajak Tingkat I Teluk Betung yang berada di bawah wewenang Kantor Inspeksi Keuangan Palembang. Pada tanggal 13 Januari 1964 secara resmi statusnya dinaikkan menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Palembang yang membawahi Kantor Dinas Luar Tingkat I Teluk Betung. Seiring perubahan status keresidenan Lampung menjadi Provinsi Lampung, pada tahun 1966 dilakukan perubahan bentuk menjadi Kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung. Sejalan dengan perubahan sistem perpajakan nasional tahun 1984 dimana prinsip pemungutan pajak dalam undang-undang perpajakan yang semula *official Assessment*, maka tanggal 1 april 1989 Kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung.

### **Metode Penelitian Sampel**

#### **Populasi**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan dalam membayar pajak yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung Bandar Lampung dari tahun 2011-2015 yang berjumlah 1.356 Wajib Pajak.

#### **Sampel**

Pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik *sampling* tertentu, yaitu *Simple Random Sampling*. Penelitian ini menggunakan 94 sampel dari 100 koisioner yang disebarkan kepada wajib pajak badan yang membayar pajak di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung. Untuk sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin.

### **Variabel Penelitian**

Variabel independen merupakan variabel simultan, prediktor, *antecedent*, yang disebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat), (Sugiyono, 2012). Adapun variabel independen dalam penelitian ini ada tiga variabel yaitu :

1. Sikap fiskus
2. Sistem administrasi perpajakan modern
3. Sanksi denda

variabel dependen adalah variabel *output*, kriteria, konsekuen, atau yang sering disebut juga variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2010). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah Kepatuhan wajib pajak badan.

**Metode Analisis Data**

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh sehingga didapatkan suatu hasil analisis atau hasil uji.

**Uji Regresi Linear Berganda**

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_t$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan pajak
- $\beta_1$  ..  $\beta_4$  = Koefisien arah regresi
- X<sub>1</sub> = Sikap fiskus
- X<sub>2</sub> = Sistem administrasi perpajakan modern
- X<sub>3</sub> = Sanksi denda
- a = Konstanta
- e<sub>t</sub> = Error Term

**Uji Hipotesis (Uji t)**

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Untuk menentukan nilai t-tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dan 2 sisi dengan derajat kebebasan  $df = (n-k-1)$  di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen. Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah :

- a. Jika  $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ , maka Ho diterima dan Ha ditolak.
- b. Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka Ho ditolak dan Ha diterima.

**4. Hasil dan Pembahasan**

**Hasil Analisis**

**Uji Kualitas Data**

**Uji Validitas**

Uji validitas merupakan tahapan awal yang dilakukan setelah data dari kuesioner diperoleh. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menghitung korelasi antar skor item instrument dengan skor total, kemudian, angka korelasi tersebut dibandingkan dengan angka kritis pada taraf signifikan 5% dan pada baris  $df$  (*degree of freedom*)  $n-3$ , yaitu  $94-3 = 91$  sehingga akan diperoleh nilai r tabel 0,204, atau apabila nilai korelasi hitung lebih besar dari angka kritis sebesar 0,204 maka pernyataan dalam kuesioner dinyatakan signifikan/valid. Kriteria valid apabila korelasi masing masing skor pertanyaan dengan skor total menunjukkan hasil yang signifikan (kurang dari 0,05) maka kuesioner dikatakan valid. Adapun hasil data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2. Uji Validitas**

No.	Corrected Item				No.	Corrected Item			
	Item	Total Corelation	R <sub>tabel</sub>	Keterangan		Item	Total Corelation	R <sub>tabel</sub>	Keterangan
1.	P1	0,505	0,204	Valid	13.	P13	0,601	0,204	Valid
2.	P2	0,210	0,204	Valid	14.	P14	0,285	0,204	Valid
3.	P3	0,233	0,204	Valid	15.	P15	0,360	0,204	Valid
4.	P4	0,522	0,204	Valid	16.	P16	0,315	0,204	Valid
5.	P5	0,408	0,204	Valid	17.	P17	0,549	0,204	Valid
6.	P6	0,340	0,204	Valid	18.	P18	0,211	0,204	Valid
7.	P7	0,424	0,204	Valid	19.	P19	0,666	0,204	Valid
8.	P8	0,608	0,204	Valid	20.	P20	0,673	0,204	Valid
9.	P9	0,619	0,204	Valid	21.	P21	0,255	0,204	Valid
10.	P10	0,526	0,204	Valid	22.	P22	0,499	0,204	Valid
11.	P11	0,476	0,204	Valid	23.	P23	0,537	0,204	Valid
12.	P12	0,500	0,204	Valid	24.	P24	0,554	0,204	Valid

(Sumber; data diolah)

**Uji Reliabilitas**

Untuk menguji reliabelitas dilakukan dengan cara mencari angka reliabilitas dari butir-butir pertanyaan dalam kuesioner dengan menggunakan rumus *standardized item alpha*. Setelah diperoleh nilai  $\alpha$ , selanjutnya membandingkan nilai tersebut dengan angka kritis reliabelitas pada tabel  $\alpha$ , instrument yang dipakai dalam variabel diketahui handal (*reliabel*) apabila memiliki *Cronbach Alpha*  $> 0,60$  (Ghozali, 2005). Sehingga dapat dikatakan *reliabel* jika nilai  $\alpha$  lebih besar dari angka kritis reliabilitas. Hasil pengujian reliabilitas ditunjukkan Tabel 3 berikut:

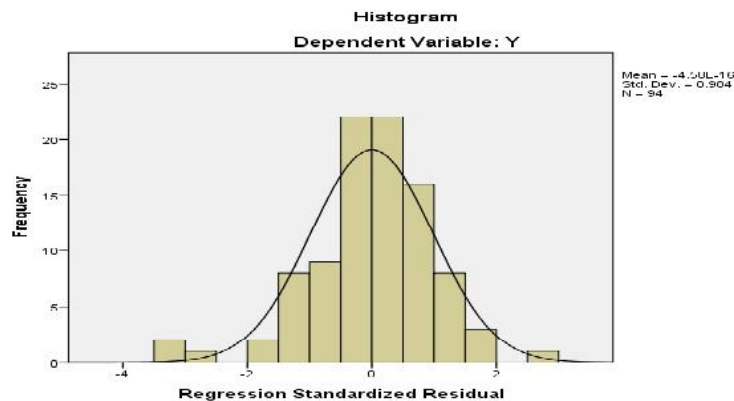
**Tabel 3. Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	Nilai $\alpha$	Reliabilitas	Keterangan
1	X <sub>1</sub>	0,632	0,60	Reliabel
2	X <sub>2</sub>	0,775	0,60	
3	X <sub>3</sub>	0,654	0,60	
4	X <sub>4</sub>	0,777	0,60	

Berdasarkan tabel 3 terlihat semua nilai  $\alpha$  lebih besar dari nilai angka kritis reliabilitas sebesar 0,60 sehingga semua butir pertanyaan dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

### Uji Normalitas

Pengujian normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji histogram.



## 5. Kesimpulan

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap sikap fiskus, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung.
3. Hasil pengujian ketiga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung.

### Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pengambilan keputusan mengenai kebijakan perpajakan bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung di masa mendatang. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi sedemikian rupa kepada pihak yang berkepentingan serta dapat digunakan sebagai bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor lainnya yaitu

KONDISI KEUANGAN karena ada kemungkinan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung.

### Daftar Pustaka

- Burton, Richard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Harjanti, Arum Puspa. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas : Studi Empiris di KPP Cilacap*. Tesis. Program Sarjana Akuntansi Universitas Diponegoro
- Ismawan, Indra. 2001. *Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Irawan, Hasan dan Siti Khairani. 2012. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Palembang*. Jurnal. Palembang: STIE MDP.
- Jatmiko, Nugroho Agus (2006), *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Jurnal. Surabaya: Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Juliyanti, Putri Dwi. 2010. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung*. Skripsi. Bandung: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas komputer Indonesia.
- Laksono, Jati Purbo. 2011. *Analisi Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang* Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Patsal, Fitriana. 2012. *Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada KPP Pratama di wilayah kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Rahman, Abdul. 2011. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Rahman, Abdul. 2011. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sofyan, Marcus Taufan. 2005. *Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-19/PJ/2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sofyan, Marcus Taufan. 2005. *Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Undang-undang No. 28 tahun 2007. *Definisi pajak*.
- Widyawati, Rissa. 2013. *Pengaruh Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. [www.Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id).

Zulaikah, Anita Ermy.2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Boyolali*. Skripsi.Surakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.